

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL  
PADA DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012-2017**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi tugas tugas dan Syarat-Syarat Mendapatkan Gelar  
Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi Syariah**

Oleh:

**NOVALIA SUSANTI  
NPM.1551010255**

**Jurusan: Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2019 M  
ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL**

**PADA DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI  
KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2012-2017**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Ekonomi Syariah

Oleh

**NOVALIA SUSANTI  
NPM. 1551010255**

**Jurusan : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Evi Ekawati S.E.,M.S.i  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, S.E.,M.E.I**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**

## ABSTRAK

Kebijakan pembangunan merupakan keputusan publik dalam mendorong proses pembangunan. Pengelolaan pemerintah daerah, di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1995 mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, *pertama*, Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Lampung? *Kedua*, Bagaimanakah persepektif Ekonomi Islam terhadap Pertumbuhan Ekonomi? Tujuan adanya penelitian ini *pertama*, Untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi, *kedua*, untuk mengetahui Bagaimana pandangan Islam terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari BPS Provinsi Lampung yang dipublikasikan kepada masyarakat. Pengolah datanya menggunakan regresi data panel yang diolah menggunakan eviews 9. Berdasarkan perhitungan menggunakan model random effect menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (X1) memperoleh nilai *coefficient* sebesar 0,800508 dan nilai Sig. sebesar 0,0044 ( $<0,05$ ) maka dinyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Umum (X1) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) di kabupaten/kota Provinsi Lampung. Untuk Variabel Dana Alokasi khusus (X2) memperoleh nilai *coefficient* sebesar -0,944398 dan nilai Sig. sebesar 0,0913 ( $>0,05$ ) maka dinyatakan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (X2) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Dana Alokasi Umum sudah di manfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan PDRB di sektor basis. Sedangkan Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat diperuntukkan untuk kebutuhan khusus daerah yang tidak terkait denggan pertumbuhan ekonomi. dalam persepektif ekonomi Islam menekankan aspek aksiologis yang menjunjung tinggi nilai moral yang tidak hanya berdampak terhadap kesejahteraan materi tetapi juga kepada kesejahteraan dunia akherat

Kata Kunci : Desentralisasi fiskal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Sekretariat : Jl. Letkol. H. Endero Suratmin, Universitas Islam Negeri Raden Intan,  
Sukarama, Bandar Lampung*

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novalia Susanti

NPM : 15510101255

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2012-2017" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujukan dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 1 Januari 2020  
Penulis,

Novalia Susanti  
1551010255





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratinin Sukarame I Bandar Lampung (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2012-2017


Nama : Novalia Susanti  
NPM : 1551010255  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam


**DISETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

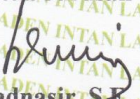
**Pembimbing I,**

**A Pembimbing II,**

  
**Evi Ekawati S.E., M.Si.**  
**NIP.197602022009122001**

  
**Muhammad Iqbal, S.E., M.E.I.**  
**NIP.198811042015031007**

**Ketua Jurusan**

  
**Madnasir, S.E., M.Si.**  
**NIP.197504242002121001**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Alamat: Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung - (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul **ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN**

**KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012-2017**, disusun oleh: Novalfia

Susanti, NPM : 1551010255, Jurusan : Ekonomi Syariah, telah diuji dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada

Hari/Tanggal : Jum'at 03 Januari 2020.

**TIM MUNAQASAH**

Ketua : Dr. H. Ahmad Isnaini, M. Ag.

Penguji I : Dr. Heni Noviarita S.E., M.Si

Penguji II : Muhammad Iqbal, S.E.I., M.E.I

Sekretaris : Iva Faizah, M.E

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



**Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si**  
**NIP. 198008012003121001**

**ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL  
PADA DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS  
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA  
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012-2017**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Memenuhi tugas tugas dan Syarat-Syarat Mendapatkan Gelar  
Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi Syariah**

Oleh:

**NOVALIA SUSANTI  
NPM.1551010255**

**Jurusan: Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1440 H / 2019 M  
ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL**

**PADA DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI  
KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI  
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2012-2017**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1  
dalam Ilmu Ekonomi Syariah

Oleh

**NOVALIA SUSANTI  
NPM. 1551010255**

**Jurusan : Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I : Evi Ekawati S.E.,M.S.i  
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, S.E.,M.E.I**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H / 2020 M**



## MOTTO

بِسْمِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیْمِ ۝

يٰۤاَيُّهَا ٱلَّذِیْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا ۚ وَٱلرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اَمْنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۚ ۝۲۷

Artinya: “Hai Orang-Orang Yang Beriman, Janganlah Kamu Mengkhianati Allah Dan Rasul (Muhammad) Dan (Juga) Janganlah Kamu Mengkhianati Amanat-Amanat Yang Dipercayakan kepadamu, Sedang Kamu Mengetahui” (Q.S Al-Anfaal:8:27)<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Q.S : Al-Anfaal (8) Ayat 27*  
Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2015

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, sehingga member kekuatan kepada penuli dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda cinta, kasih dan hormat tak terhingga kepada:

1. Bapak Li Imron dan Ibu Herawati sebagai kedua orang tua saya. Terimakasih atas segala do'a, cinta, kasih sayang, kesabaran serta pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepadaku. Berkat pengorbanan, jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan hingga skripsi ini terselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rizeki dan keberkahan umur kepada kalian serta selalu dalam lindungan Allah SWT *aamiin ya robbal'amin*.
2. Adikku Gilang Pramudia Ananta dan Aryesta Vanesya dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayangnya kepada saya.
3. Teman seperjuanganku Lilya Novita, Evantri Sagita dan teman-teman kosanku yang telah menemaniku selama menempuh pendidikan.
4. Almamaterku tercinta tempat ku mencari Ilmu yang bermanfaat dunia akhirat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

## RIWAYAT HIDUP

Saya sangat bahagia karena terlahir menjadi anak dari Bapak Li Imron dan Ibu Herawati, kebahagiaan yang berlipat ganda karena penulis di anugerahkan nama oleh kedua orang tua yaitu Novalia Susanti. Dilahirkan di Hujung, 10 Oktober 1997. Riwayat pendidikan penulis yang telah diselesaikan adalah:

1. MIN 3 Lampung Barat, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2003-2009
2. MTs Muhammadiyah Hujung, Kabupaten Lampung Barat tahun 2009-2012
3. MAN 1 Lampung Utara, Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2012-2015
4. Penulis melanjutkan pendidikan UIN Raden Intan Lampung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah 2015.

Selama menjadi siswa penulis turut aktif dalam kegiatan pramuka selama menjadi siswa sekolah.



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrohmanirrohim*

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga samapai saat ini saya sebagai penulis diberikan kesehatan, kemudahan, serta kelancaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012-2017”**

Dalam penyelesaian Skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan. Dalam kesepakan ini saya sebagai penullis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan Bapak Madnasir, S.E.,M.SI selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Ibu Ekawati, S.E.,M.S.I selaku Pembimbing satu yang telah banyak meluangkan waktu dan memberi arahan serta kemudahan dalam membimbing serta memberikan motivasi hingga skripsi ini selesai.
3. Bapak M. Iqbal, S.E.I., M.E.I selaku pembimbing dua yang membantu meluangkan waktu dan memberikan arahan serta kemudahan dalam membimbing serta memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat.
5. Pimpinan dan staf Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan informasi dan data penelitian.
6. Teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2015 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung khususnya kelas B. Serta semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kelalaian dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah SWT mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya penulis dapat bermanfaat bagi kita semua.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
1. Secara Objektif.....	2
2. Secara Subjektif .....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Batasan Masalah .....	12
E. Rumusan Masalah .....	12
F. Tujuan Penelitian .....	13
G. Manfaat Penelitian .....	13

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kajian Teori.....	14
1. Desentralisasi Fiskal.....	14
a. Pengertian Desentralisasi Fiskal.....	14
b. Bentuk-bentuk Desentralisasi Fiskal .....	15
c. Otonomi Daerah Melalui Desentralisasi Fiskal.....	16
d. Prinsip Desentralisasi Fiskal .....	16
e. Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah .....	17
f. Perbedaan antara Desentralisasi dan Sentralisasi .....	19
g. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Dalam Ekonomi Islam.....	20
2. Dana Alokasi Umum .....	21
a. Pengertian Dana Alokasi Umum .....	21
b. Bentuk-bentuk Dana Alokasi Umum.....	22
c. Cara Perhitungan Menentukan Besar Dana Alokasi Umum.....	23
d. Desentralisasi Fiskal dalam Dana Alokasi Umum .....	27
e. Dana Alokasi Umum Dalam Pandangan Islam.....	27



3. Dana Alokasi Khusus .....	29
a. Pengertian Dana Alokasi Khusus .....	29
b. Syarat Memperoleh Dana Alokasi Khusus .....	30
c. Pengelolaan dan Pemantauan Dana Alokasi Khusus.....	31
d. Kegiatan Dana Alokasi Khusus.....	31
e. Perbedaan antara Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus	32
f. Dana Alokasi Khusus Dalam Islam .....	32
4. Pertumbuhan Ekonomi .....	34
a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi .....	34
b. Teori Pertumbuhan Ekonomi .....	35
c. Komponen-komponen Utama Dalam Pertumbuhan Ekonomi.....	36
d. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi .....	37
e. Pertumbuhan Ekonomi kota dan Struktur Kota.....	39
f. Pengembangan Ekonomi Daerah.....	39
g. Perwujudan Ekonomi Daerah.....	41
h. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah .....	42
i. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam .....	42
j. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Islam .....	44
B. Kerangka Pemikiran.....	45
C. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis.....	47
1. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	50
2. Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	51

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	52
1. Jenis Penelitian.....	52
2. Sifat Penelitian .....	52
B. Jenis dan Sumber Data.....	53
C. Metode Pengumpulan Data .....	53
1. Dokumentasi .....	53
2. Studi Pustaka.....	54
D. Definisi Operasional Variabel .....	54
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	56
1. Teknik Analisis Data Panel.....	56
2. Teknik Estimasi Regresi Data Panel .....	59

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	63
1. Gambaran Umum Provinsi Lampung.....	63
2. Topografi .....	64
3. Sejarah Provinsi Lampung.....	65
B. Analisis Data .....	70
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	70

2. Analisis Regresi Data Panel.....	71
3. Pemilihan Model Regresi .....	76
4. Hasil Uji Parsial (t-Statistik).....	78
5. Hasil Uji F-statistik .....	78
6. Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	79
C. Pembahasan .....	79
1. Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota Provinsi Lampung .....	80
2. Persepektif Ekonomi Islam Terhadap Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus .....	85

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	91

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>
----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

1.1 Realisasi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Provinsi di Lampung Tahun 2012-2017 .....	5
3.1 Definisi Operasional Variabel .....	55
4.1 Daftar Gubernur Provinsi Lampung beserta Periode Jabatan .....	69
4.2 Analisis Deskriptif .....	70
4.3 Hasil Regresi Data Panel dengan Menggunakan Metode <i>Common Effect</i> .....	72
4.4 Hasil Regresi Data Panel dengan Menggunakan Metode <i>Fixed Effect</i> .....	73
4.5 Hasil Regresi Data Panel dengan Menggunakan Metode <i>Random Effect</i> .....	75
4.6 Uji <i>Chow</i> .....	76
4.7 Uji <i>Hausman</i> .....	77
4.8 Estimasi <i>Random Effect Model</i> .....	77



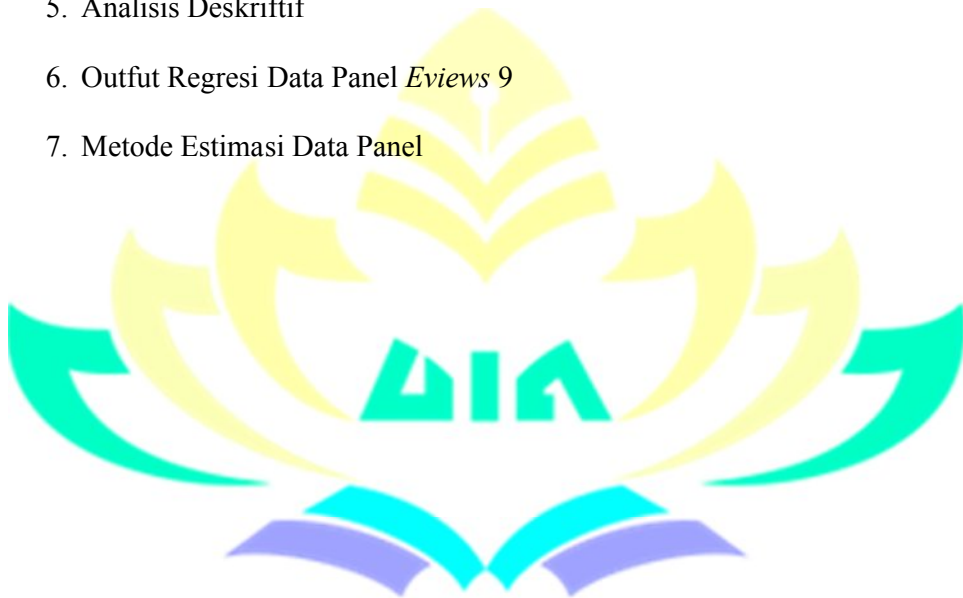
## DAFTAR GAMBAR

2.1 Kebijakan Umum Transfer ke Daerah .....	17
2.2 Skema DAU berdasarkan UU No. 33/2004 Pasal 28 .....	25
2.3 Kerangka Berfikir .....	47



## DAFTAR LAMPIRAN

1. SK Pembimbing
2. Blanko Konsultasi
3. Realisasi pembagian DAU dan DAK kabupaten/kota Provinsi Lampung  
Tahun 2012-2017
4. Data yang diuji
5. Analisis Deskriptif
6. Outfut Regresi Data Panel *Eviews 9*
7. Metode Estimasi Data Panel



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul skripsi ini, maka sangatlah penting memberikan penjelasan terlebih dahulu. Berikut penjelasan mengenai judul “Analisis Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2012-2017”.

1. Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang membentuk ikut watak, kepercayaan serta perbuatan seseorang.<sup>1</sup>
2. Desentralisasi Fiskal adalah suatu cara yang dilakukan oleh setiap Negara dalam mengatur sektor publik yang dalam hal ini selalu mencerminkan sejarah, geografi, keseimbangan politik, tujuan kebijakan dan karakteristik lain yang berbeda tajam antara satu Negara dengan Negara lainnya.<sup>2</sup>
3. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu fungsi pemerintah menjalankan tugasnya melayani masyarakat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia, 2011), h. 1045.

<sup>2</sup>Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah : Menuju Era Baru Pembangunan Daerah* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 46.

<sup>3</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2012*, h. 6.



4. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus.<sup>4</sup>
5. Pertumbuhan Ekonomi diartikan sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan pengembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila di bandingkan dengan tahun sebelumnya.<sup>5</sup>

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan saya memilih judul skripsi tentang “Analisis Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2012-2017” ini adalah

### **1. Secara Objektif**

- a. Hal ini bagi penulis menarik untuk diteliti karena terjadi pada saat ini, desentralisasi fiskal yang dituangkan pada DAU dan DAK terlihat belum sepenuhnya membuat perubahan yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. masih banyak daerah daerah yang dikategorikan tertinggal, sehingga perlunya mengetahui seberapa berpengaruhnya DAU dan DAK tersebut terhadap pertumbuhan ekonominya.
- b. Penelitian ini akan meneliti tentang Analisis Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Setiap Kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun 2012-2017.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2006), h. 9.

## 2. Secara Subjektif

- a. Data dan literature yang mendukung pembahasan skripsi ini cukup tersedia, sehingga diduga kuat skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
- b. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini sesuai dengan tema yang di tentukan yaitu pembahasan mengenai ekonomi pembangunan.

## C. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pembangunan yang merupakan keputusan publik dalam rangka mendorong proses pembangunan tidak hanya di perlukan pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat wilayah. Kebijakan pada tingkat wilayah diperlukan karena kondisi, permasalahan dan potensi pembangunan yang dimiliki oleh suatu wilayah umumnya berbeda satu lainnya.<sup>6</sup>

Pengelolaan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten dan kota memasuki era baru sejalan dengan dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 dan UU no 25 tahun 1995 yang mengatur tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan ini merupakan tantangan dan peluang bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efisien dan efektif. Bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam, kebijakan ini ini disambut baik mengingat lepasnya campur tangan pemerintah akan memeberikan kesempatan yang lebih cepat meningkatkan kesejahteraan. Berubahnya suatu perencanaan terutama dalam perencanaan anggaran, tidak selalu berdampak negatif. Apabila jeli dalam memanfaatkan peluang yang ada, sumber-sumber penerimaan dapat

---

<sup>6</sup> Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), h. 164.

dikelola dengan lebih baik sehingga target penerimaan dapat terlampaui. Selaras dengan pembangunan nasional, peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah terus diusahakan untuk lebih meningkat. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Sebagai solusi Pemerintah menetapkan alokasi transfer dana dari pusat ke daerah yang berbeda. Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal yang tinggi akan mendapat pasokan dana yang lebih kecil daripada daerah yang kapasitas fiskalnya rendah. Pemberian transfer ini bertujuan untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan horizontal (antar daerah) serta kesenjangan vertikal (pusat-daerah). DAU dan DAK sebagai elemen desentralisasi fiskal menjadi penting bagi pemerintah daerah untuk menutup pembiayaan daerah.

DAU dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota besarnya ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Sementara pengalokasian Dana Alokasi Khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya.<sup>8</sup> Dana Alokasi Khusus diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan daerah dengan penyediaan dana pendamping 10% yang berasal dari penerimaan umum.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Statistik Keuangan Daerah*..., h. 15.

<sup>8</sup>Setiyawati, Hamzah, "Analisis PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan, Analisis Jalur". *Jurnal Akutansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.4, No. 2 (Desember 2007), h. 213.

<sup>9</sup>Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah*..., h. 63.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Realisasi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan**  
**Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung Tahun**  
**2012-2017**

No	Kabupaten/kota	Tahun	DAU	DAK	PE
1	Bandar Lampung	2012	762.664.927,00	50.491.130,00	6.04
		2013	864.818.641,00	65.028.050,00	6.88
		2014	921.826.931,00	42.841.640,00	7.05
		2015	950.106.009,00	21.338.810,00	6.33
		2016	1.053.233.762,00	264.089.420,79	6.43
		2017	1.034.730.849,00	306.836.123,00	6.28
2	Metro	2012	330.158.143,00	26.599.220,00	5.9
		2013	374.201.187,00	36.676.760,00	6.88
		2014	414.624.161,00	34.078.240,00	6.13
		2015	402.921.330,00	47.459.160,00	6.87
		2016	463.881.055,00	195.172.232,46	5.9
		2017	453.830.037,00	195.678.411,13	5.66
3	Lampung Tengah	2012	954.226.843,00	126.573.510,00	6.1
		2013	1.086.335.279,00	92.974.600,00	6.46
		2014	1.177.513.282,00	83.469.500,00	5.68
		2015	1.220.616.169,00	108.709.710,00	5.38
		2016	1.341.242.293,00	434.602.614,48	5.62
		2017	1.317.680.979,00	348.727.979,51	5.29
4	Lampung Selatan	2012	686.434.133,00	115.550.690,00	5.21



		2013	769.867.834,00	77.181.780,00	6.41
		2014	847.657.151,00	96.471.570,00	5.8
		2015	881.977.998,00	108.844.850,00	5.38
		2016	1.031.445.915,00	307.022.483,92	5.22
		2017	1.012.225.482,00	237.409.640,97	5.46
5	Lampung Timur	2012	763.748.797,00	73.496.890,00	5.78
		2013	860.136.385,00	62.383.990,00	8.96
		2014	940.041.243,00	66.426.790,00	2.87
		2015	974.792.193,00	98.427.520,00	4.58
		2016	1.081.165.467,00	410.141.910,60	4.2
		2017	1.062.555.526,00	344.577.034,39	4.64
6	Lampung Utara	2012	661.427.000,00	80.961.800,00	4.1
		2013	761.218.384,00	92.155.100,00	4.64
		2014	838.661.589,00	89.315.410,00	5.8
		2015	861.223.623,00	96.819.610,00	5.43
		2016	960.294.182,00	246.321.995,07	5.1
		2017	945.025.570,00	263.655.841,03	5.21
7	Lampung Barat	2012	486.998.706,00	64.868.720,00	5.78
		2013	558.555.207,00	89.282.150,00	6.87
		2014	388.7543.57,00	82.070.780,00	5.56
		2015	491.134.702,00	124.051.420,00	5.32
		2016	523.586.535,00	280.016.977,00	5.01

		2017	519.160.196,00	224.323.822,02	5.03
8	Tanggamus	2012	530.838.460,00	91.286.390,00	5.13
		2013	600.816.655,00	71.179.650,00	6.76
		2014	669.512.156,00	84.431.860,00	5.9
		2015	698.708.398,00	147.451.200,00	5.5
		2016	789.442.526,00	294.567.907,13	5.18
		2017	775.574.559,00	295.744.411,89	5.21
9	Pesawaran	2012	476.870.845,00	57.108.820,00	6
		2013	71.179.650,00	66.613.055,00	6.2
		2014	625.845.694,00	78.453.260,00	5.59
		2015	601.857.515,00	78.564.690,00	5.03
		2016	675.736.319,00	204.605.874,00	5.07
		2017	668.378.478,00	233.668.793,67	5.1
10	Pringsewu	2012	443.529.040,00	91.917.180,00	5.9
		2013	499.454.898,00	57.508.750,00	6.43
		2014	547.622.366,00	47.232.130,00	5.75
		2015	570.582.781,00	148.606.880,00	5.22
		2016	633.088.784,00	262.251.256,00	5.04
		2017	621.967.450,00	211.150.481,00	5
11	Way Kanan	2012	450.615.498,00	69.624.180,00	4.88
		2013	517.219.746,00	84.930.760,00	5.28
		2014	573.114.161,00	82.270.930,00	5.67

		2015	639.549.226,00	110.652.610,00	5.27
		2016	656.605.460,00	223.100.142,00	5.14
		2017	650.83.8237,00	346.865.482,69	5.11
12	Tulang Bawang	2012	412.608.587,00	66.123.880,00	6.23
		2013	482.230.950,00	53.295.680,00	6.75
		2014	533.313.684,00	59.728.060,00	5.54
		2015	548.942.825,00	160.149.520,00	5.02
		2016	614.655.240,00	212.694.631,35	5.42
		2017	559.655.961,00	189.492.163,58	5.45
13	tulang bawang barat	2012	323.813.870,00	68.267.740,00	5.88
		2013	380.947.218,00	48.614.120,00	6.37
		2014	424.389.404,00	50.444.530,00	5.5
		2015	442.703.859,00	175.081.630,00	5.35
		2016	464.431.679,00	232.176.864,92	5.27
		2017	459.231.176,00	175.022.408,44	5.64
14	Pesisir Barat	2012	00000000000	00000000000	0
		2013	132.342.345,00	4.100.320,00	6
		2014	227.314.157,00	4.702.470,00	5.1
		2015	363.680.538,00	56.949.410,00	4.91
		2016	413.299.797,00	164.505.834,00	5.31
		2017	410.991.252,00	191.580.410,20	5.34
15	Mesuji	2012	294.053.217,00	40.212.090,00	5

		2013	338.570.276,00	40.263.987,00	5.2
		2014	387.694.110,00	51.809.920,00	5.69
		2015	402.889.285,00	102.360.880,00	5.23
		2016	447.672.298,00	82.056.181,12	5.1
		2017	444.344.769,00	98.631.010,59	5.2

*Sumber: Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012-2017*

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengalokasian Dana Alokasi Umum terlihat dari setiap tahunnya yang cenderung mengalami kenaikan. Pengalokasiannya di sesuaikan dengan kesanggupan fiskalnya. Pembagian DAU kepada seluruh provinsi kabupaten/kota berdasarkan bobot dari masing-masing daerah, yang ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan wilayah otonom daerah dan potensi ekonomi daerah. Karena itu prinsip yang di pakai disini adalah DAU dialokasi sesuai dengan kesenjangan fiskal antar wilayah.<sup>10</sup>

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus terlihat dari setiap tahunnya yang cenderung tidak teratur. Terlihat bahwa dari tahun ketahun mengalami naik turun yang tidak dapat di prediksi namun lebih dominan pada tingkat kenaikannya. Alokasi yang didistribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Kebutuhan khusus yang dapat dibiayai dengan DAK antara lain kebutuhan yang tidak dapat di perkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU.<sup>11</sup>

Berdasarkan tabel 1.1 kabupaten Lampung Timur memiliki nilai pertumbuhan ekonomi tertinggi selama kurun waktu dari tahun 2012-2017 dibandingkan dengan 14 kabupaten/kota lainnya dengan angka pertumbuhan

<sup>10</sup> Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah Dan ...*, h. 134.

<sup>11</sup> Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah .....*, h. 70.



ekonomi sebesar 8,96 pada tahun 2013. Yang tertinggi berikutnya adalah kota Bandar Lampung dengan nilai 7,05 pada tahun 2014. Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki nilai pertumbuhan ekonomi terendah yaitu kabupaten Lampung Timur dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 2,87.

Laju pertumbuhan ekonomi provinsi Lampung sebagai provinsi di pintu gerbang Pulau Sumatera sempat ikut mengalami perlambatan ekonomi sebagai imbas dari kondisi perekonomian global yang lesu.<sup>12</sup> Peranan kabupaten/kota terhadap perekonomian provinsi akan terlihat pada kontribusi PDRB masing-masing kabupaten/kota. Selama kurun waktu 6 tahun terakhir kabupaten Lampung Tengah menempati urutan pertama dalam penciptaan nilai tambah, kontribusinya sebesar 19,68 persen pada tahun 2017. Kabupaten pesisir barat menempati posisi terakhir dengan kontribusi sebesar 1.27 persen pada tahun 2017.<sup>13</sup>

Pulau Sumatera adalah pulau yang berada di sebelah barat kepulauan Indonesia yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan pulau Jawa, dan Lampung adalah salah satu provinsinya. Lampung adalah provinsi paling selatan di pulau Sumatera Indonesia, ibukotanya terletak di Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki dua kota dan 13 kabupaten. Provinsi Lampung memiliki pelabuhan utama yaitu pelabuhan Panjang dan pelabuhan Bakauheni. Secara geografis kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatra, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, dan menjadi andil penting

---

<sup>12</sup> BPS Provinsi Lampung, *Laporan Perekonomian Provinsi Lampung 2017*, h. 8.

<sup>13</sup> BPS Provinsi Lampung, *Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten/kota ...*, h. 8.

dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera dan begitupun sebaliknya.<sup>14</sup>

Salah satu syarat untuk tercapainya kemakmuran adalah adanya pertumbuhan ekonomi.<sup>15</sup> pertumbuhan Otonomi daerah dalam bentuk desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam mengatur keuangan daerahnya harus dimanfaatkan dalam konteks memberikan pelayanan yang lebih, bukan dengan pembebanan pajak yang semakin meningkat yang bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. berbagai cara dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publik, diantaranya dengan memperoleh dana dari sumber-sumber yang dialokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK.<sup>16</sup> Dana perimbangan tersebut cenderung mengalami kenaikan dari tahun ketahun.<sup>17</sup>

Tingkat perekonomian suatu daerah akan mengalami perubahan sejalan dengan pemanfaatan sumber daya alam dan faktor produksi oleh unit usaha atau unit kegiatan ekonomi.<sup>18</sup> Dengan demikian desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi mempunyai hubungan yang berkesinambungan sebab terlihat bahwa kebijakan desentralisasi fiskal adalah sebagai penunjang pendapatan perkapita, pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran yang

---

<sup>14</sup>Lampung” (On-line), tersedia di: [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Lampung](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Lampung) (11 Februari 2019)

<sup>15</sup>Prathama Rahardja Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonomi (MikroEkonomi dan MakroEkonomi)*, Jakarta: Lembaga Penertib Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008, h. 480.

<sup>16</sup>Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Statistik Keuangan ....*, h. 13.

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 14.

<sup>18</sup> BPS Provinsi Lampung, *Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten/kota Provinsi Lampung 2017*, h. 7.

dapat menjelaskan keadaan ekonomi. oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi adalah objek ataupun tujuan dari kebijakan desentralisasi fiskal.

Tidak hanya pemerintah sistem perekonomian juga diatur dalam agama islam. Sistem perekonomian islam ialah sistem perekonomian yang di landasi Al-Quran sebagai kalamuAllah dan Assunah sebagai perkataan dan perbuatan Rosul semasa hidupnya. Sistem mensejahterakan rakyat dalam islam tidak menganut sebelah pihak.

Pada prinsipnya islam adalah agama yang mendorong pemeluknya untuk melakukan aktifitas ekonomi yang memiliki sifat produktif, baik dalam aktifitas pekerjaan maupun dalam pengelolaannya.<sup>19</sup> Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tergantung bukan pada sektor produksi saja tetapi juga pada pembagiannya yang sesuai. Kekayaan dapat di produksi di suatu Negara dalam jumlah yang besar tetapi jika pendistribusiannya tidak dilandaskan atas prinsip-prinsip Nya yang benar dan adil, maka Negara tersebut tidak dapat mencapai kemakmuran.

Dalam literature islam, keadilan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengan antara dua perkara. Telah dijelaskan diatas ketetapan desentralisasi fiskal ditujukan dalam mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Sistem mensejahterakan rakyat dalam islam tidak menganut sebelah pihak, Dalam politik ekonomi islam, Negara mempunyai peran penting dalam perekonomian. Negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut,

---

<sup>19</sup> Yusuf Qardawi, *Peran Nilai Moral Dan Perekonomian Islam* (Jakarta: Rabbani Pers, 2001), h. 151.

dengan syarat bahwa tugas itu dengan cara demokratis dan adil, dimana segala keputusan di ambil setelah bermusyawarah dengan wakil-wakil rakyat. Negara bertugas dan bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam ekonomi, mencegah terjadinya setiap kedzaliman, menindak para para pelanggar hukum di bidang ekonomi serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dengan mengatur fasilitas-fasilitas umum dan sistem jaminan sosial.<sup>20</sup> sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ أَ مَّنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ أَوَّيَّ عَزِيزٍ ٢٥

Artinya: "sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-Rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka al-kitab dan neraca supaya mereka manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia (supaya mereka menggunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agamaanya) dan Rasul-Nya, padahal Allah tidak dilihatnya, sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa". (Q.s Al-Hadid:25)<sup>21</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa telah diutus Rosul-Rosul yang ditunjuk untuk menegakkan keadilan bagi manusia. Allah menurunkannya sebagai hidayah bagi makhlukh dan untuk membimbing mereka kepada hal yang bermanfaat bagi mereka baik pada agama maaupun dunia mereka. penyebutan keadilan bersamaan dengan besi menunjukkan pentingnya penegakan keadilan dengan kekuatan(kekuasaan) yang dalam ayat tersebut

<sup>20</sup> Ricky Dwi Apriyono, "Peranan Negara Dalam Perekonomian persefektif islam" (On-line), tersedia di: <http://www.iaie-pusat.org/article/ekonom> ( 1 Agustus 2019)

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya, Q.S Al-Hadid:25*, (Bandung: Penerbit Diponegoro)

disebutkan dengan besi. Dengan demikian, Negara hendaknya menggunakan kekuasaan kekuasaan untuk mewujudkan keadilan dalam ekonomi.

Para penguasa pada periode islam yang pertama sangat menyadari tanggung jawab mereka selaku kepala Negara terhadap perekonomian, terutama pada pemenuhan kebutuhan dasar seluruh warga Negara. Hal ini dijelaskan sebagai acuan kita dalam mempergunakan nikmat Allah dengan sangat baik. Sumber-sumber ekonomi dimuka bumi ini tidak terbatas, tetapi ketika jatuh kepada pengolahan yang salah pasti akan selalu ada kekurangan. Kekurangan ini dilihat dari sudut pengembangan wajib dari sumber ekonommi yang perlu dibangun. Maka dengan itu seruan untuk memajukan ekonomi nasional tertanam lekat dan kuat dalam hati. Sehingga penelitian ini mengangkat judul **“Analisis Pengaruh Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Setiap Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2012-2017”**.

#### **D. Batasan Masalah**

Batasan masalah digunakan untuk mendapat temuan yang terfokus dan mendalami permasalahan serta menghindari penafsiran berbeda serta mempermudah pembaca memahami penelitian. Dalam ini kebijakan desentralisasi yang diambil bagian Dana Alokasi Umum dan Dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen dan tingkat pertumbuhan ekonomi dilihat dari tingkat Produk Domestik Regional Bruto Sebagai variabel dependen.

#### **E. Rumusan Masalah**



Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumuskan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Lampung?
2. Bagaimanakah persepektif Ekonomi Islam terhadap Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui berpengaruh atau tidaknya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan Islam terhadap Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

#### **G. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pengetahuan bagi pengguna ilmu pada umumnya, khususnya dalam bidang ekonomi pembangunan mengenai kebijakan desentralisasi fiskal di provinsi Lampung.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pengaruh DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi kepada pembaca.

3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber pengetahuan rujukan dan menambah literature dalam penelitian untuk dijadikan pedoman atau

perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut, serta diharap dapat referensi bagi para peneliti berikutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian teori**

##### **1. Desentralisasi fiskal**

###### **a. Pengertian Desentralisasi Fiskal**

Desentralisasi merupakan bagian dari strategi setiap institusi yang berkehendak untuk tidak mati dalam persaingan global. Ia adalah strategi untuk menjadi kompetitif. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau di inginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal memiliki tujuan yang sama dengan kebijakan moneter, hanya saja berbeda pada kebijakannya. Dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan uang yang beredar namun dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluaranya.<sup>22</sup> Kebijakan fiskal dikatakan efektif jika mampu mengubah tingkat bunga ( $r$ ) atau outfut sesuai dengan yang di inginkan pemerintah.

Desentralisasi fiskal adalah pemberian kekuasaan dan tanggung jawab untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal meliputi bidang

---

<sup>22</sup> Prathama Rahardja Mandala Manurung, *Pengantar Ilmu Ekonom ....*, h. 445.

pengeluaran dan penerimaan. Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik.

Kebijakan desentralisasi fiskal tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah. Diberlakukannya Undang-Undang tersebut memberikan peluang bagi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan untuk mewujudkan kemandirian daerah.<sup>23</sup>

#### **b. Bentuk-bentuk Desentralisasi**

Bentuk-bentuk desentralisasi sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Sistem pemerintah daerah yang menyeluruh ( *comprehensive local government system* ) dalam hal ini pelayanan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh aparat-aparat yang mempunyai tugas bermacam-macam. Aparat daerah melakukan fungsi-fungsi yang serahkan oleh pemerintah pusat. Aparat daerah melakukan pelayanan tugas-tugas aparat pusat, seperti: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan umum.
- 2) *Partnership System*, yaitu beberapa jenis pelayanan dilaksanakan langsung oleh aparat pusat dan beberapa jenis yang lain pula dilakukan oleh aparat daerah. Aparat daerah melakukan beberapa fungsi dengan beberapa kebebasan tertentu pula. Sistem ini menggunakan aparat pusat dan aparat daerah secara terpisah dalam

---

<sup>23</sup> UU No. 32-33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

<sup>24</sup> Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah* (Jakarta: PUSTAKA SINAR HARAPAN, 2002), h. 54.

melakukan kegiatan, namun juga dapat melakukan bersama sama sesuai kebutuhan dan keadaan.

- 3) *Dual System*, yaitu aparat pusat melaksanakan pelayanan teknis secara langsung demikian juga aparat daerah. Apa yang dilakukan aparat daerah tidak boleh lebih dari apa yang telah digariskan menjadi urusannya.
- 4) *Integrated Administrative System*, yaitu aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung di bawah pengawasan seorang pejabat coordinator.

#### **c. Otonomi Daerah Melalui Desentralisasi Fiskal**

Pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal terkandung tiga misi utama yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Mememberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

#### **d. Prinsip Desentralisasi Fiskal**

Mengacu pada pasal 2 UU No.33 / 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, prinsip desentralisasi fiskal adalah:<sup>26</sup>

- 1) Desentralisasi fiskal harus tetap memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan

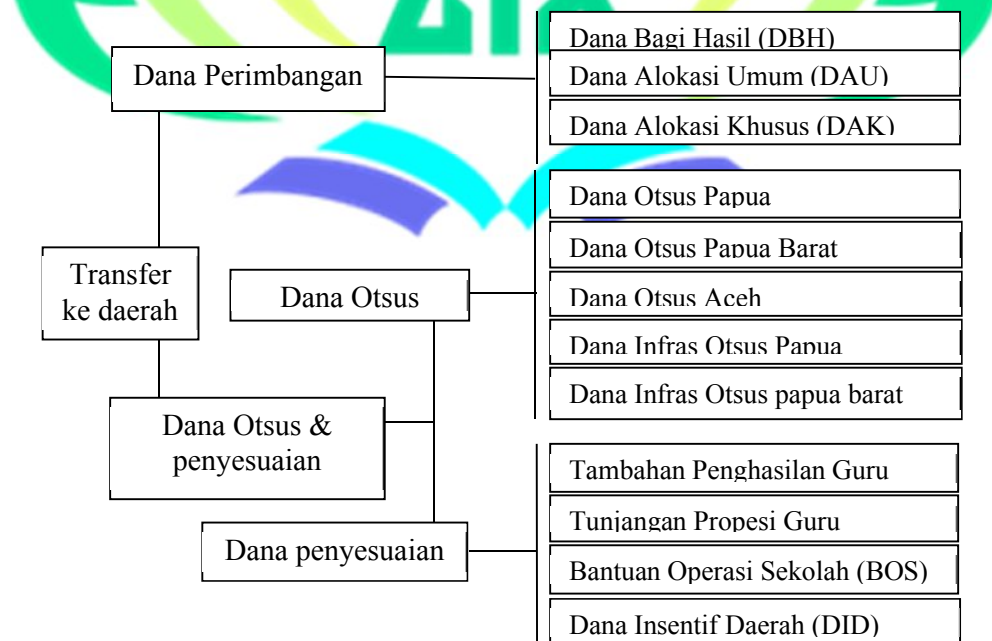
---

<sup>25</sup> Hadi Susana, "Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No.1 (Juni 2009), h. 106.

<sup>26</sup> Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah.....*, h. 49.

Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintahan pusat dan daerah dan pemerintah daerah.

- 2) Pemberian sumber keuangan Negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antara daerah.
- 3) Perimbangan keuangan Negara antara pemerintah pusat dan daerah merupakan merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.



Sumber: Kemenkeu (2012)

**Gambar 2.1**  
**Kebijakan Umum Transfer ke Daerah**

#### e. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah



Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pemerintah Pusat dan daerah.<sup>27</sup>

UU No. 25 Tahun 1999 mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dengan tujuan untuk.<sup>28</sup>

- 1) memberdayakan dan meningkatkan perekonomian daerah.
- 2) menciptakan sistem pembiayaan daerah yang adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.
- 3) Mendukung pelaksanaan otonomi daerah dengan penyelenggaraan pemerintah daerah yang transparan.
- 4) Mengurangi kesenjangan antar daerah dalam kemampuannya untuk membiayai tanggung jawab otonominya.
- 5) Memberikan kepastian keuangan daerah yang berasal dari wilayah daerah yang bersangkutan.

---

<sup>27</sup> Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Da...*, h. 104.

<sup>28</sup> *Ibid.* h. 107.

6) Memperhatikan partisipasi masyarakat dan pertanggung jawabannya.

Kepada daerah diberikan Dana Perimbangan yang terdiri dari:<sup>29</sup>

- 1) Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- 3) Penerimaan dari sumber daya alam
- 4) Dana Bagi Hasil
- 5) Dana Alokasi Umum
- 6) Dana Alokasi Khusus

#### **f. Perbedaan Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah**

1. Perbedaan pemegang kekuasaan untuk pengambilan keputusan

Asas Sentralisasi memusatkan segala pengambilan keputusan yang berkaitan dengan seluruh aspek kenegaraan kepada pemerintah pusat. Sedangkan dengan Asas Desentralisasi pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengambil keputusan untuk daerah nya sendiri.

2. Perbedaan ruang lingkup

Ruang lingkup Penerapan asas Sentralisasi meliputi seluruh wilayah Negara. Ruang lingkup penerapan Desentralisasi lebih kecil yaitu wilayah suatu daerah tertentu.

3. Perbedaan kemajuan pembangunan daerah

Keputusan berada di tangan pemerinthan pusat menyebabkan terjadinya kesenjangan pembangunan Negara. Pembangunan

---

<sup>29</sup> *Ibid* h. 108.

infrastruktur dan sosial budaya terfokus pada beberapa wilayah saja. Penerapan asas Desentralisasi mewmberiakn kemajuan pembangunan daerah yang sangat pesat. Daerah dapat memaksimalkan potensi sumber daya alam dan sunber daya manusianya untuk melaksanakan pembangunan daerah.

#### 4. Perbedaan Respon rakyat terhadap sentralisasi dan desentralisasi

Respon masyarakat di daerah terhadap penerapan sentralisasi kurang baik, karena asas ini menjadikan kesenjangan pembangunan di tengah masyarakat. Masyarakat lebih menyukai desentralisasi, karena setiap daerah mempunyai kesempatan dalam mengembangkan daerahnya.

#### **g. Kebijakan desentralisasi fiskal dalam ekonomi islam**

Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila di bandingkan kebijakan moneter. Aspek politik dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh khalifah adalah dalam rangka mengurus dan melayani umat. Kebijakan-kebijakan yang terapkan haruslah mengikutsertakan semangat tauhid didalam sistem itu, agar semakin mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kemajuan ekonomi.<sup>30</sup> Dilihat dari bagaimana islam memecahkan problematika ekonomi, maka berdasarkan kajian fakta permasalahan ekonomi secara mendalam terungkap bahwa hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah

---

<sup>30</sup> Eko Suprayitno, *EKONOMI ISLAM: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 16.

tengah masyarakat sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil.<sup>31</sup> Allah SWT mengingatkan kita bahwa pentingnya fungsi pemerintah dalam mengelola pemberian Allah. Hal ini terdapat dalam Qs. Al-An'am:165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ  
دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ١٦٥

Artinya: "Dan Dialah (Allah) yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.s. Al-An'am:165)<sup>32</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah mengangkat sebagian manusia sebagai pemimpin dalam pengelolaan dimuka bumi, Allah mengangkat derajat manusia tidaklah sama antara satu dengan yang lainnya, ada yang di tinggikan dan ada yang rendahkan. Tujuannya adalah sebagai pengelola dimuka bumi untuk melakukan penataan yang adil bagi masyarakat di bumi atas segala pemberian Allah.<sup>33</sup>

## 2. Dana Alokasi Umum (DAU)

### a. Pengertian Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup

<sup>31</sup> Mustafa Edwin Nasution, et. Al. *Pengenalan Eksklusif: EKONOMI ISLAM* (Depok: KENCANA, 2017), h. 204.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura...., Q.S Al-An'Am: 165*

<sup>33</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemahan Dan Tafsir* ( Jakarta: Amzah, 20015), h. 46.

kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.<sup>34</sup>

Transfer atau *grants* dari pemerintah pusat secara garis besar dapat di bagi menjadi dua, yakni *matching grants* dan *non-matching grants*. Kedua grants tersebut digunakan oleh pemda untuk memenuhi belanja rutin dan belanja pembangunan. Belanja rutin adalah belanja yang sifatnya terus-menerus untuk setiap tahun fiskal dan umumnya tidak menghasilkan wujud fisik. Sementara belanja pembangunan umumnya menghasilkan wujud fisik seperti jalan, jembatan dan sebagainya. Belanja pembangunan fisik diantaranya mencakup pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya.<sup>35</sup>

#### **b. Bentuk-bentuk Dana Alokasi umum**

Dana Alokasi Umum terdiri dari.<sup>36</sup>

##### **1) Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi.**

Jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua Daerah Provinsi dan jumlah jumlah Dana Alokasi Umum bagi semua daerah Kabupaten/kota masing-masing ditetapkan setiap tahun dalam anggaran APBN.

##### **2) Dana Alokasi Umum untuk Daerah Kabupaten/kota.**

<sup>34</sup> BPS Provinsi Lampung, *Statistik Keuangan Daerah Prov....*, h. 6.

<sup>35</sup> Kesit Bambang Prakoso, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY, *JAAI* vol 8, No. 2, Desember 2004, h. 102.

<sup>36</sup> Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.183.

Dana Alokasi Umum ini merupakan jumlah Seluruh Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan untuk daerah Kabupaten/kota. Perubahan Dana Alokasi Umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengadilkan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

### **c. Cara Perhitungan Menentukan Besar Dana Alokasi Umum**

Secara umum, DAU terdiri dari dua kategori yaitu dana alokasi umum untuk daerah provinsi dan dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota. Adapun cara menghitung Dana Alokasi Umum menurut ketentuan adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah Provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- 3) Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah kabupaten/kota yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 4) Porsi daerah kabupaten kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

---

<sup>37</sup>Kesit Bambang Prakoso, Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli....., h. 104.



Ditetapkan dalam rapat panitia Anggaran DPR-RI dengan pemerintah tanggal 10 Juli 2002, bahwa penyempurnaan formula dan perhitungan DAU dilakukan dengan.<sup>38</sup>

- 1) Meningkatkan akurasi data dasar yang digunakan.
- 2) Mengurangi porsi DAU yang diperhitungkan dalam AM dan memperbesar porsi DAU yang dialokasikan untuk mengurangi kesenjangan Keuangan antar daerah (perhitungan DAU dengan formula dalam PP 84 / 2001)
- 3) Diupayakan untuk tetap mempertahankan bahwa tidak ada daerah yang menerima DAU TA 2003, sebagai contoh, kurang dari atau minimal sama dengan DAU plus Dana penyeimbangan TA 2002. Oleh karena itu, diberikan tambahan dana melalui Dana Penyeimbangan TA 2003.

Formula DAU hingga tahun 2004 berdasarkan PP Nomor 84 / 2001 adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

$$DAU_1 = AM + KF$$

$$AM = LS + \alpha \text{ Gaji}$$

$$KF_1 = Bdi \times DAUn$$

$$BD_1 = \frac{(KbF - KpF)_1}{(KbF - KpF)_n}$$

Keterangan:

$DAU_1$  = Dana Alokasi Umum Provinsi atau Kabupaten / Kota

$DAU_n$  = Dana Alokasi Umum seluruh Provinsi atau Kabupaten/Kota

---

<sup>38</sup> Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah*....., h. 63.

<sup>39</sup> *Ibid.* h. 64.

AM = Alokasi Minimum

KF = Kesenjangan Fiskal

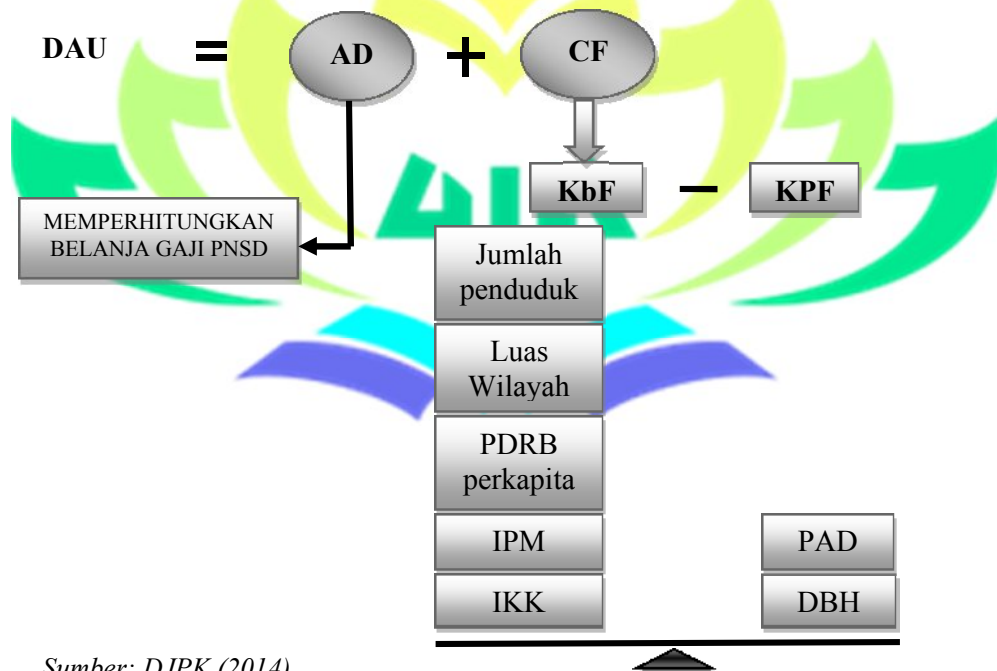
BD = Bobot Daerah

LS = *Lumpsum*

A Gaji = Proporsional berdasarkan kebutuhan gaji

Kbf = Kebutuhan Fiskal dari Provinsi atau Kabupaten/Kota

KpF = Kapasitas Fiskal dari Provinsi atau Kabupaten/Kota



Sumber: DJPK (2014)

**Gambar 2.2**  
**Skema DAU berdasarkan UU No. 33/2004 pasal 28**

Perhitungan DAU yang baru dirangkum dalam gambar di atas, dimana DAU sebagai salah satu komponen dana perimbangan, dialokasiak berdasarkan atas formula yang memperhitungkan konsep Alokasi Dasar

(AD) dan Celah Fiskal (CF) atau disebut sebagai *Fiscal gap* (DJPk, 2014: 18 – 19).<sup>40</sup>

- a. AD dihitung berdasarkan jumlah dan belanja gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan serta tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan pengajian PNS termasuk di dalamnya tunjangan beras dan tunjangan PPh.
- b. KbF diukur dengan menggunakan fiskal sejumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- c. KpF merupakan perhitungan DAU adalah PAD dan DBH

Beberapa formula penting dalam perhitungan DAU adalah sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Kebutuhan Fiskal (KbF) ditentukan dengan formula sebagai berikut:

$$KbF = TPR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IKR + \alpha_4 IH)$$

Keterangan:

TPR : Total Pengeluaran Rata-rata dalam APBD

IP : Indeks Variabel Penduduk

IW : Indeks Variabel Luas Wilayah

IKR : Indeks Variabel Kemiskinan Penduduk

IH : Indeks Variabel Harga

A : Bobot Variabel

---

<sup>40</sup> *Ibid.* h. 65.

<sup>41</sup> *Ibid.*

b. Kapasitas Fiskal (KpF) ditentukan dari:

$$KpF = PAD + \text{Bagi Hasil (PBB + BPHTB + PPh + SDA)}$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah Estimasi

PBB : Pajak Bumi dan Bangunan

BPHTB : Bea Perolehan Fiskals Tanah dan Bangunan

PPh : Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pasal 21

SDA : Sumber Daya Alam

#### **d. Desentralisasi Fiskal Dalam Dana Alokasi Umum**

Desentralisasi Fiskal dalam DAU merupakan pemberian kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan dalam mengelola dana APBN yang di transfer ke daerah berbentuk DAU yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

Penggunaan DAU diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan masyarakat dalam rangka mengurangi celah fiskal antar daerah.

#### **e. Dana Alokasi Umum dalam Pandangan Islam**

Aspek politik yang dilakukan khalifah adalah dalam rangka mengurus dan melayani umat. Dalam sistem ekonomi Islam, penganggaran keuangan Negara merupakan suatu kewajiban Negara yang menjadi hak rakyat. Sehingga hal tersebut tidak hanya sebagai kebutuhan untuk perbaikan ekonomi tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sama halnya dengan Dana Alokasi Umum yang

merupakan amanat dalam menjalankan pelayanan publik yang harus sejalan dengan pemerataan yang di syariatkan dalam islam. Pembagian Dana Alokasi Umum dalam sistem ekonomi Islam tidak bertumpu pada pertumbuhan ekonomi seperti dalam sistem ekonomi konvensional tetapi mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat sehingga titik berat pemecahan masalah ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi yang adil.<sup>42</sup> Allah SWT mengingatkan kita tentang betapa sangat pentingnya permasalahan distribusian harta yang adil sesuai dengan firmanNya dalam Q.s Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

مَا أَفَاءَ أَوْ عَلَى رَسُولٍ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنََّّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang di berikan Allah kepada Rasulullah (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q.s. Al-Hasyr:7)<sup>43</sup>

<sup>42</sup> Naf'an *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah* ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), h. 174.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur...., Q.S Al-Hasyr:7.*

Karena itu, pendistribusian dalam islam dilandasi oleh suatu politik ekonomi (*as siaysatu al iqtishadi*) yang bertujuan mencapai distribusi ekonomi yang adil, sebagaimana yang di kemukakan diatas. Yaitu menjamin pemenuhan kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh dalam pelayanan publik.<sup>44</sup>

### 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

#### a. Pengertian Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah terpilih untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Tujuan dari penggunaan DAK dapat diarahkan pada upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia yang merupakan salah satu isu nasional yang perlu dituntaskan.<sup>45</sup> DAK ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. UU No. 25 / 1999 pasal 8 menggariskan bahwa kebutuhan khusus yang dapat dibiayai dengan DAK antara lain kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan secara umum dengan menggunakan rumus DAU. Karena itu, aloksi yang di distribusikan oleh pemerintah pusat sepenuhnya merupakan wewenang pusat untuk tujuan nasional khusus. Desentralisasi fiskal dalam DAK merupakan pemberian kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke

---

<sup>44</sup> Naf'an *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi*..., h. 183.

<sup>45</sup> Setiyawati, Hamzah, *Analisis PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pe* ..., h. 213.



daerah dalam mengelola APBN yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai Kebutuhan khusus dalam DAK meliputi<sup>46</sup> :

- 1) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain. Contohnya mobil angkutan khusus.
- 2) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi. Contohnya wisma dan persinggahan.
- 3) Kebutuhan prasarana dan sarana yang terletak di daerah pesisir / kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana. Contohnya tanggul pemecah ombak.
- 4) Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan. Contohnya program reboisasi dan pembuatan irigasi.

#### **b. Syarat-syarat untuk memperoleh DAK**

DAK diberikan kepada daerah tertentu berdasarkan usulan kegiatan daerah dengan penyediaan dana pendamping 10% yang berasal dari penerimaan umum APBD, (kecuali untuk DAK reboisasi). Adapun persyaratan untuk memperoleh DAK adalah sebagai berikut<sup>47</sup>:

- 1) Daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kegiatan tersebut dari PAD , Bagi Hasil Pajak dan SDA, Pinjaman Daerah, dan lain lain penerimaan yang sah.

---

<sup>46</sup> Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah*....., h. 70.

<sup>47</sup> *Ibid.*

- 2) Daerah menyediakan dana pendamping sekurang-kurangnya 10% dari kegiatan yang diajukan (dikecualikan untuk DAK dari dana reboisasi)
- 3) Kegiatan tersebut memenuhi kriteria teknis sektor / kegiatan yang ditetapkan oleh menteri teknis / instansi terkait.

#### **c. Pengelolaan dan Pemantauan DAK**

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus kepada daerah ditetapkan oleh menteri keuangan setelah memperhatikan pertimbangan menteri dalam negeri dan otonomi daerah, menteri teknis terkait dan instansi yang membidangi perencanaan pembangunan nasional. Menteri teknis/instansi terkait melakukan pemantauan dari segi teknis terhadap proyek/kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus. Pemantauan terkait bertujuan untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai Dana Alokasi Khusus tersebut sesuai dengan tujuan persyaratan yang ditetapkan.<sup>48</sup>

Pemeriksaan penggunaan Dana Alokasi Khusus oleh daerah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan alokasi Dana Alokasi Khusus disesuaikan proses penataan organisasi pemerintahan daerah dan pengalihan pegawai ke daerah.<sup>49</sup>

#### **d. Kegiatan DAK**

Kegiatan DAK berdasarkan PP No. 104/2000 meliputi:<sup>50</sup>

- 1) DAK digunakan untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan serta perbaikan Prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

---

<sup>48</sup> Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Peny....*, h. 189.

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 190.

<sup>50</sup> Mudrajat Kuncoro, *Otonomi Daerah....*, h. 71

- 2) Dalam keadaan tertentu, DAK dapat membantu membiayai pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 tahun.

**e. Perbedaan Antara DAU dan DAK**

1. Tujuan DAU untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, yaitu untuk membiayai kekurangan dalam memanfaatkan PAD nya. Sedangkan DAK bertujuan untuk membiayai kebutuhan khusus urusan pemerintah daerah yang sesuai dengan prioritas nasional.
2. Pembagian DAU meliputi, DAU untuk daerah provinsi dan DAU untuk daerah kabupaten/kota. Pembagian DAK disesuaikan berdasarkan usulan daerah.
3. Besar DAU ditetapkan 26% dari pendapatan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN. Sedangkan besar DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN dengan penyediaan dana pendamping sebesar 10% dari penerimaan umum.
4. Besaran DAU dapat dipastikan setiap tahunnya. Sedangkan besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya.

**f. Dana Alokasi Khusus dalam Islam**

Dana Alokasi Khusus dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus. Sama halnya dengan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus juga didistribusikan sesuai dengan kebutuhannya, hal ini penting mengingat pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan. Ketidakbenaran dalam distribusi

menjadikan alokasi harta tidak seimbang. Di pihak lain, keadaan ini berkaitan dengan visi ekonomi Islam di tengah-tengah umat manusia lebih sering mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik. Keuangan Islam sebagai sarana tercapainya pembangunan ekonomi yang dilandaskan konsistensi dan stabilitas untuk mencapai kesejahteraan. Pembangunan semacam inilah yang akan selaras dengan tujuan-tujuan syariah.<sup>51</sup>

Ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang. Islam menetapkan tingkatan yang mulia demi terwujudnya persamaan dan demokrasi diantara prinsip-prinsip Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.s Shadd ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ٢٦

Artinya: "Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan." (Q.s. Shaad:26)<sup>52</sup>

Islam mengarahkan distribusi yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas masalah. Agar timbul dampak yang baik seperti saling menghargai serta terlihatnya tanggung jawab Negara terhadap masyarakat.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Lukman Hakim *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2012), h. 133.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'ân, Q.S Al-Shaad:26*.

<sup>53</sup> Lukman Hakim *Prinsip-prinsip Ekonomi Isl....*, h. 163.

#### 4. Pertumbuhan Ekonomi

##### a. Pengertian pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan atau kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah pada periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan Produk Domesti Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun ke tahun.<sup>54</sup>

Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan: perbaikan infrastruktur, peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal, menyediakan perumahan dengan biaya rendah, melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian.<sup>55</sup>

Tingkat pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dalam bentuk persen, periode satu tahun dengan Rumus sebagai berikut:

$$R = \frac{PDB_{rt} - PDB_{rt-1}}{PDB_{rt-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

R : laju pertumbuhan ekonomi dalam satuan persen

$PDB_{rt}$  : Produk Domestik Bruto tahun tertentu (rt)

$PDB_{rt-1}$  : Produk Domestik Bruto pada tahun sebelumnya (rt-1)

---

<sup>54</sup> Priyo Hari Adi, *Dampak Desentralisasi Fiskal ....*, h. 2.

<sup>55</sup> Mawarwi, Darwania, Syukriy Abdullah, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Aceh), *Jurnal Akutansi Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No.2, Mei 2013. h. 83.

## **b. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

### **1) Teori Harrod-Domar**

Teori Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonomi yaitu Evsey dan Sir Roy F. Harrod. setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (COR).<sup>56</sup>

Dalam teori Harrod-Domar, yang secara sederhana menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP ditentukan oleh rasio tabungan nasional netto dan rasio modal output nasional, secara bersama-sama. Teori menyatakan bahwa dengan tidak adanya campur tangan pemerintah maka tingkat pertumbuhan pendapatan nasional secara langsung atau positif akan berkaitan dengan rasio tabungan (yakni, semakin besar bagian GDP semakin besar pula pertumbuhan GDP) dan berbanding balik dengan modal output perekonomian (yakni, semakin tinggi  $c$ , semakin rendah pula pertumbuhan GDP).<sup>57</sup>

Agar dapat tumbuh, setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan bagian tertentu dari GDP. Semakin banyak yang ditabung dan diinvestasikan maka laju pertumbuhan ekonomi juga semakin cepat.

---

<sup>56</sup> Muhammad Rusyidi, "faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi", *Jurnal Ilmu Ekonomi Balance*, vol. 7 No. 1 (Juni, 2011, h. 45.

<sup>57</sup> Michael P. Todaro, Stephen c, Smith, *Ibid*, h. 137-138



## 2) Teori Adam Smith

Menurut pandangan Adam Smith, kebijakan *laissez faire* atau mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh masyarakat. Menurut pandangan Adam Smith pengembangan hak milik (*property right*), spesialisasi dan pembagian kerja merupakan faktor-faktor yang terjalin dalam proses pertumbuhan ekonomi secara historis. Smith membagi sejarah peradaban manusia kedalam empat tahapan yaitu: pertama, tahap berburu (*hunting*), kedua tahap beternak (*pastoral*), ketiga pertanian (*agriculture*), dan keempat tahap perdagangan (*commerce*).

Dalam pembangunan ekonomi, modal memegang peranan yang penting. Menurut teori Adam Smith, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu Negara. Melihat dari fokus-fokus teori pembangunan yang telah disebutkan sebelumnya, teori yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi maupun wilayah/daerah di Indonesia adalah model Harrod-Domar dimana tabungan dan investasi hal yang perlu ditingkatkan.

### c. Komponen-komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi

Terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

- 1) Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.

- 2) Pertumbuhan penduduk, yang beberapa tahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah akumulasi capital.
- 3) Kemajuan teknologi.

#### **d. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi**

Proses pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua macam faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor nonekonomi.

##### **1) Faktor Ekonomi**

Para ahli ekonomi menganggap faktor produksi sebagai kekuatan utama yang mempengaruhi pertumbuhan. Laju pertumbuhan ekonomi jatuh dan banggunya merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi didalam faktor produksi tersebut. Beberapa faktor ekonomi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a) Sumber Alam: tersedianya sumber alam secara melimpah merupakan hal yang penting. Namun dalam pertumbuhan ekonomi, kekayaan alam yang melimpah saja belum cukup, harus disertai dengan pemanfaatan sumber daya alam yang tepat dan diolah dengan teknologi yang baik sehingga efisiensi dipertinggi dan sumber daya alam dapat dipergunakan dalam jangka waktu lebih lama.
- b) Akumulasi Modal: Modal berarti faktor persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi. Proses pembentukan modal bersifat kumulatif dan membiayai diri sendiri.
- c) Organisasi: Organisasi bersifat melengkapi modal, buruh dan membantu meningkatkan produktivitasnya.

---

<sup>58</sup> M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2012), h. 67.

d) Kemajuan teknologi: perubahan teknologi berkaitan dengan perubahan dalam metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan. Perubahan teknologi telah menaikkan produktifitas buruh, modal dan faktor produksi yang lain.

e) Pembagian kerja dan skala produksi: pembagian kerja menghasilkan perbaikan kemampuan produksi buruh. Setiap butuh menjadi lebih efisien daripada sebelumnya, mampu menghemat waktu, menemukan mesin baru, dan menemukan proses produksi baru.

## 2) Faktor nonekonomi

Faktor Nonekonomi juga memiliki arti penting di dalam pertumbuhan ekonomi. beberapa faktor nonekonomi tersebut adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

a) Faktor sosial: faktor sosial dan budaya jga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. kekuatan faktor ini menghasilkan perubahan pandangan, harapan, struktur, dan nilai nilai sosial.

b) Faktor Manusia: penggunaan secara tepat sumber daya manusia dapat membantu pertumbuhan ekonomi. penempatan tenaga kerja yang telatih dan terdidik akan membawa masyarakat kepada pembangunan ekonomi yang pesat.

c) Faktor politik dan administrasi: struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan penghambat besar bagi pertumbuhan ekonomi Negara berkembang. administrasi yang kuat, efisien dan tidak korup penting untuk pertumbuhan ekonomi. tetapi yang

---

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 73.

terpenting adalah administrasi yang bersih dan kondisi politik yang stabil.

#### **e. Pertumbuhan ekonomi kota dan struktur kota**

Kota merupakan pemusatan dari bewrbagai kegiatan yang meliputi kegiatan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan administrasi. Jumlah penduduk di dearah perkotaan menunjukkan perkembangan yang makin meningkat, karena daerah perkotaan mempunyai daya tarik yang kuat yaitu menjanjikan kesempatan kerjayang lebih luas, pendapatn yang lebih tinggi dan berbagai kemudahan lainnya.<sup>60</sup>

Penyempurnaan prasarana dan sarana perkotaan diarahkan pada berbagai fasilitas pelayanan publik yang disediakan dalam jumlah yang cukup sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi kota. Disamping itu diperlukan peran serta swasta dan masyarakat yang bersiafat partisipasif dalam rangka mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.<sup>61</sup>

#### **f. Pengembangan Ekonomi Daerah**

Perekonomian daerah dikembangkan melalui pendekatan pembangunan wilayah yang mendasarkan pada keunggulan dan potensi masing-masing daerah, dan percepatan pertumbuhan kawasan, pembukaan daerah terisolasi dan terpencil, serta mendorong pembangunan daerah, agar tercipta keserasian pembangunan antar daerah. Tujuan peningkatan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan

---

<sup>60</sup> Rahardjo Adisasmita, *pembangunan ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 41.

<sup>61</sup> *Ibid.* h. 109.

kapasitas pemerintah daerah untuk mememberdayakan masyarakat melalui upaya pelayanan masyarakat secara lebih efektif.<sup>62</sup>

Untuk mewujudkan pengembangan perekonomian berdasarkan karakteristik potensi, geografis dan kebutuhan daerah, maka strategi kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:<sup>63</sup>

- 1) Meningkatkan aksesibilitas untuk memperlancar aliran investasi dan produksi serta meningkatkan keterkaitan ekonomi antar daerah yang saling mendukung.
- 2) Mendorong pemanfaatan potensi sumberdaya alam yang belum tergali di daerah tertinggal dan menciptakan perkembangan kawasan-kawasan potensi ekonomi baru.
- 3) Meningkatkan kelangsungan kegiatan usaha yang sudah ada di sentra-sentra produksi di daerah yang relative maju sebagai andalan pertumbuhan ekonomi dan mengembangkannya dalam kerangka perekonomian wilayah berdasarkan kesamaan karakteristik potensi geografis dan kebutuhan daerah.
- 4) Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan daya tarik investasi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah sesuai dengan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan lokasi geografisnya.

#### **g. Perwujudan Otonomi Daerah**

---

<sup>62</sup> Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 124.

<sup>63</sup> *Ibid*, h.126.

Hak otonomi yang diperlukan sebagai landasan politik untuk memberikan peluang bagi masyarakat berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, belum dapat direalisasikan mengakibatkan daerah otonom selalu dalam kondisi dan posisi yang serba salah. Keadaan seperti ini tentu saja tidak dapat dipertahankan terus menerus apabila kita ingin maju sesuai dengan perkembangan iptek yang cepat dan era globalisasi.<sup>64</sup>

#### 1) Aspek Sumber Daya Manusia

Peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1992 menyatakan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah secara berdayaguna dan berhasil guna dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka titik berat otonomi daerah perlu diletakkan di daerah tingkat II yang kedudukannya lebih langsung berhubungan dengan masyarakat.

#### 2) Pengembangan Sumber Daya Alam

Pengembangan sumber daya alam apabila dikelola dan pemanfaatan hasilnya dapat dilakukan oleh pemda diharapkan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dan mewujudkan otonomi yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab.

### **h. Indikator Keberhasilan Otonomi Daerah**

Indikator-indikator keberhasilan otonomi daerah adalah:

---

<sup>64</sup> Tim suara pembaharuan, *Otonomi Peluang dan Tantangan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), h. 3.



- 1) Masing-masing daerah mampu mengurus rumah tangganya.<sup>65</sup>
- 2) Semua urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan layak untuk diserahkan kepada daerah telah dilaksanakan.
- 3) Pendapatan asli daerah yang meningkat dan memungkinkan untuk mendukung secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kalau mungkin dapat memungkinkan terjadinya akselerasi pertumbuhan perekonomian daerah.
- 4) Terwujudnya mekanisme pembinaan teknis oleh menteri teknis, pembinaan umum oleh Menteri Dalam Negeri dan pembinaan operasional oleh pemerintah daerah tanpa terjadi gesekan dan tumpang tindih antara pembinaan dan keseluruhannya merupakan perwujudan pembangunan pada daerah.

#### **i. Pertumbuhan Ekonomi Dalam Islam**

Perhatian islam terhadap pertumbuhan ekonomi sebenarnya telah mendahului sistem kapitalisme atau marxisme yang berkembang di Barat. Hal ini dibuktikan dengan berbagai hasil karya tentang ekonomi dunia dalam pertumbuhan ekonomi hasil karya kaum muslim yang jauh mendahului karya-karya Barat. Beberapa pemahaman pokok mengenai pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif islam di antaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi. lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam bidang produksi yang berkaitan erat dengan keadilan distribusi. Pertumbuhan

---

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 12.

bukan hanya persoalan ekonomi melainkan aktivitas manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia. Dikhususkan pertumbuhan dan pembangunan dalam ekonomi islam ditekankan untuk meningkatkan martabat manusia<sup>66</sup>

Penekanan di sini ialah bahwa pertumbuhan ekonomi telah ada dalam wacana pemikiran muslim klasik, yang dibahas dalam “pemakmuran bumi” yang merupakan pemahaman dari firman Allah Qs.

Hud ayat 61:

قَالُوا يٰشُعَيْبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرٰكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ٩١

Artinya: *Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. dia Telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, Karena itu mohonlah ampunan-Nya, Kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)."*<sup>67</sup>

Terminologi “pemakmuran tanah” mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi. untuk merealisasikan pertumbuhan kekayaan bagi anggota masyarakat dalam suasana kemudahan dan kasih sayang, dan berbagai persyaratan yang memungkinkan mereka dapat saling memberi dan menjalankan tugas dalam kehidupan ini. Disisi lain, islam mendorong agar produk masyarakat mampu memenuhi kebutuhan pokok semua anggotanya dengan sejumlah komoditas yang memang

124. <sup>66</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2017), h.

<sup>67</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qura....., Q.S Hud:11*

diperlukan dalam tingkat berimbang bagi keseluruhan untuk mendapatkannya.<sup>68</sup>

#### **j. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Islam**

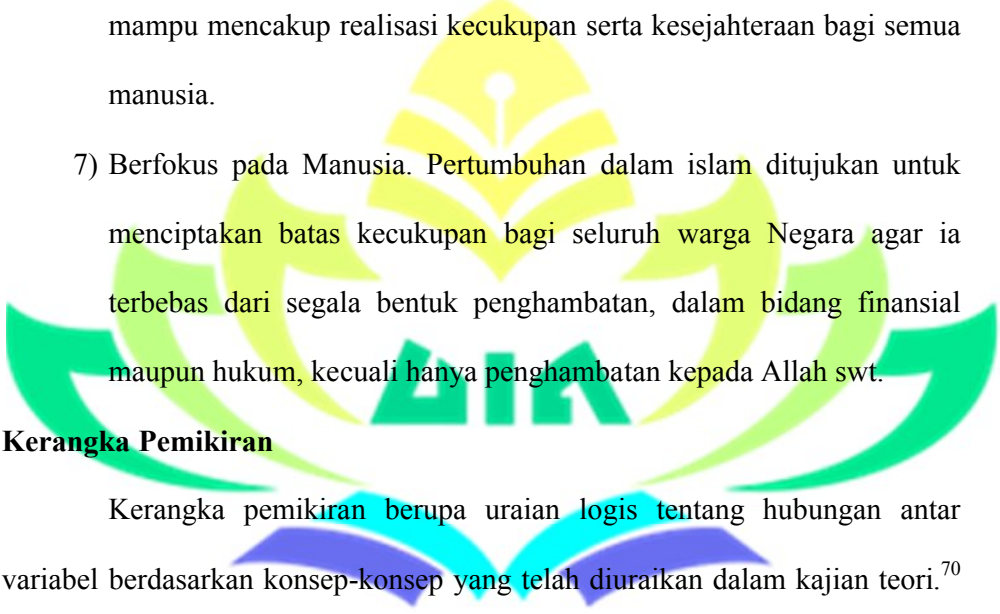
Pertumbuhan ekonomi dalam persepektif Islam tidak sekedar pada peningkatan barang dan jasa, namun juga pada aspek moralitas dan keadilan serta keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Beberapa karakteristik dalam pertumbuhan ekonomi islam, sebagai berikut:<sup>69</sup>

- 1) Serba meliputi. Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer yaitu untuk menciptakan keadilan sosial.
- 2) Berimbang. Pertumbuhan ekonomi islam tidak hanya di orientasikan untuk menciptakan pertumbuhan produksi saja, namun juga ditujukan berlandaskan distribusi yang adil bagi setiap masyarakat suatu negara.
- 3) Realistis. Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan sesuai kenyataan. Sifat realistis dalam bidang pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa islam melihat persoalan ekonomi dan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat islam dengan tawaran solusi yang juga realistis.
- 4) Keadilan. Islam dalam menegakkan hukum-hukumnya harus dengan dilandaskan atas keadilan dan keselarasan yang tepat diantara manusia.

---

<sup>68</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Pembangunan....*, h.124.

<sup>69</sup> *Ibid.* h. 126.

- 
- 5) Bertanggung jawab. Landasan adanya tanggung jawab sebagai salah satu fondasi paling penting di ungkapkan secara jelas dan gamblang dalam syariat islam.
  - 6) Mencukupi. Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab, namun tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu mencakup realisasi kecukupan serta kesejahteraan bagi semua manusia.
  - 7) Berfokus pada Manusia. Pertumbuhan dalam islam ditujukan untuk menciptakan batas kecukupan bagi seluruh warga Negara agar ia terbebas dari segala bentuk penghambatan, dalam bidang finansial maupun hukum, kecuali hanya penghambatan kepada Allah swt.

## **B. Kerangka Pemikiran**

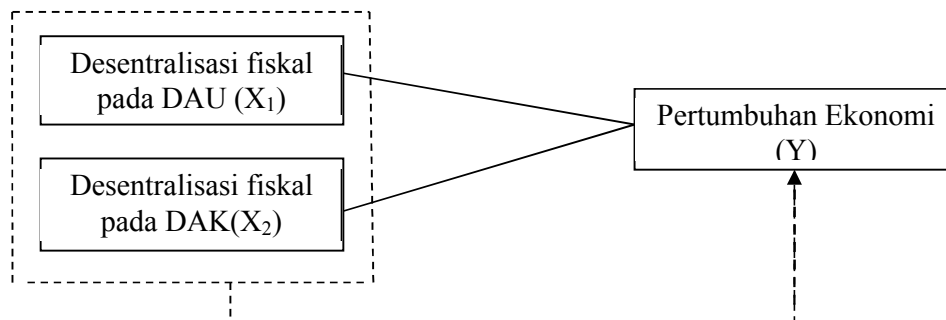
Kerangka pemikiran berupa uraian logis tentang hubungan antar variabel berdasarkan konsep-konsep yang telah diuraikan dalam kajian teori.<sup>70</sup>

Kerangka pemikiran digunakan sebagai pedoman atau sebagai gambaran alur pemikiran dalam fokus pada tujuan penelitian. Penelitian mengenai perbandingan pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal pada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Lampung tahun 2012-2017 yang berfokus pada variabel Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.

---

<sup>70</sup> *Pedoman penulisan skripsi* (universitas islam raden intan lampung, 2017/2018), h. 49.

Desentralisasi fiskal merupakan peluang bagi daerah untuk mengembangkan potensi yang ada di daerahnya demi kemajuan pembangunan dan menciptakan pertumbuhan ekonomi untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi fiskal dilakukan melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN dialokasikan ke daerah sebagai bentuk menunjang kebutuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum(DAU), dan Dana Alokasi Khusus(DAK). Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Berperan begitu penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah, Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran yang menunjukkan peningkatan taraf peningkatan hidup penduduk yang jumlahnya terus menerus meningkat dengan pesat. Secara garis gambar di bawah dapat digunakan sebagai gambaran dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan tentang Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.



Gambar 2.3. Kerangka Berfikir

Keterangan:

————— : Parsial

----- : Simultan

### C. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap suatu permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.<sup>71</sup> Penelitian ini tidak terlepas dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai acuan yang di ikuti. Adapun hasil-hasil penelitian yang menjadi acuan tidak terlepas dari topik mengenai kebijakan desentralisasi fiskal pada Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Hadi Sasana dimana melakukan penelitian mengenai “Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah”. Dalam jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 10, No 1, Juni 2005. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal berpengaruh atau tidak terhadap kinerja ekonomi kabupaten/kota. Dengan Desentralisasi fiskal sebagai variabel X1, Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Y1, Tenaga kerja terserap sebagai variabel Y2, Penduduk Miskin sebagai variabel Y3, dan Kesejahteraan Masyarakat sebagai variabel Y4. Berdasarkan penelitian tersebut desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. desentralisasi mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila desentralisasi fiskal dipusatkan pada pengeluaran/ pembelanjaan publik. Desentralisasi fiskal yang diukur dengan pengeluaran

---

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Cetakan ke-9 Bandung: Alfabeta, 2017). H. 99.



pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Terkait dengan hal tersebut, alokasi belanja pembangunan harus dilakukan secara cermat.<sup>72</sup>

Penelitian mengenai desentralisasi fiskal juga telah dilakukan oleh Anis Setiyawati dan Ardi Hamzah dengan judul “Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan Analisis Jalur”. Jurnal akuntansi dan keuangan Indonesia, Desember 2007, Vol.4, No.2, hal.211-228. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. DAU juga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi pengaruhnya adalah negatif. Penelitian ini menunjukkan semakin besar DAU yang di peroleh, maka semakin menghambat pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan tidak keseluruhan DAU digunakan untuk pembangunan tetapi hanya sebagian kecil saja yang digunakan, itupun terkadang untuk program-program atau kegiatan yang kurang memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk DAK dan belanja pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk pengujian pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan dan pengangguran menunjukkan pengaruh yang signifikan, tetapi pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan berpengaruh positif terhadap pengangguran.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Hadi Susana, “Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/kota Prov.....”, h. 115.

<sup>73</sup> Setiyawati, Hamzah, *Analisis PAD, DAU, DAK, .....*, h. 211-228.

Penelitian tentang Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus juga dilakukan oleh Ni Wayan Ratna Dewi dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Aloksi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. jurnal Akutansi Universitas Udayana Vol. 2 No.3 Maret 2017. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negative dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi, namun Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.<sup>74</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian menggunakan 3 variabel yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel X, serta Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel Y. sedangkan penelitian terdahulu menggunakan 7 variabel yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Aloksi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja pembangunan sebagai variabel X, serta Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran sebagai variabel Y. penelitian ini juga membandingkan besar pengaruh antar variabel di setiap/kabupaten kota sedangkan penelitian terdahulu hanya menjelaskan pengaruhnya secara bersamaan.

Dengan demikian hipotesis yang diajukan oleh penulis sebagai berikut:

### **1. Pengaruh DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Dana Alokasi Umum membantu kemandirian pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat, serta

---

<sup>74</sup> Ni Wayan Ratna Dewi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. *Jurnal Akutansi Universitas Udayana*, Vol.2, No. 3 (Maret 2017), h. 123.

menunjang kenaikan perkapita, pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran yang dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi.

Menurut penelitian yang Setiyawati, Hamzah menunjukkan bahwa DAU berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pengaruh tersebut menarah pada pengaruh negatif. Semakin besar DAU yang diperoleh, maka semakin menghambat pertumbuhan ekonomi, hal ini dikarenakan tidak keseluruhan DAU digunakan untuk pembangunan tetapi hanya sebagian kecil yang digunakan itupun terkadang untuk program-program atau kegiatan yang kurang member dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan teori dan didukung oleh hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota sebagai berikut:

**H1** : Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota.

## **2. Pengaruh DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berbeda hal nya dengan DAU, Dana Alokasi Khusus merupakan dana dari pemerintahan pusat yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu kebutuhan khusus, yaitu berarti DAK merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan yang sudah digariskan.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Wayan Ratna Dewi menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan teori dan didukung oleh hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota sebagai berikut:

**H2** : Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-quran dan Kamus:

Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia, 2011).

### 2. Buku:

Adisasmita Rahardjo, *pembangunan ekonomi* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Adisasmita Rahardjo, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Amin Suma Muhammad, *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemahan Dan Tafsir* Jakarta: Amzah, 20015.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, *Laporan Perekonomian Provinsi Lampung* 2012-2017.

-----, *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung* 2012-2017.

-----, *Tinjauan Ekonomi Regional Kabupaten/kota Provinsi Lampung* 2012-2017.

Doddy Ariefianto Moch, *EKONOMETRIKA esensi dan aplikasi dengan menggunakan eviws*, Jakarta: Erlangga, 2012.

Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Edwin Nasution Mustafa, et. Al. *Pengenalan Eksklusif: EKONOMI ISLAM* Depok: KENCANA, 2017.

Huda Nurul, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2017.

Kadir, *Statistika Terapan: konsep , Contoh dan Analisis Data Dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Kuncoro Mudrajad, Ph.D., *Otonomi Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Lukman Hakim *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Manurung Prathama Raharda Mandala, *Pengantar Ilmu Ekonomi (MikroEkonomi dan MakroEkonomi)*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008.
- Mulyono Sri, *SATISTIKA Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2006.
- M. L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2012.
- Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Naf'an *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Surabaya: ZIFATAMA PUBLISHING, 2016.
- Qardawi Yusuf, *Peran Nilai Moral Dan Perekonomian Islam*, Jakarta: Rabbani Pers, 2001.
- Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta: PUSTAKA SINAR HARAPAN, 2002.
- Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Cetakan ke-9 Bandung: Alfabeta, 2017.
- , *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Cetakan Ke-20 Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Peulisan Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sukino Sadono, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2006.



Suprayitno Eko, *EKONOMI ISLAM: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Tim suara pembaharuan, *Otonomi Peluang dan Tantanagn*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.

Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistik dengan Eviews* Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.

### 3. Jurnal:

Endrawati, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Bealnja Daerah Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada 29 Kabupaten Dan 9 Kota Di Jawa Timur). *Jurnal STIE Semarang*, Vol 8 Nomor 1, Tahun 2016

Mawarwi, Darwania, Syukriy Abdullah, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dana Dna Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Aceh)”, *Jurnal Akutansi Universitas Syiah Kuala*, Vol. 2, No.2, Mei 2013.

Muhammad Rusyidi, “faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Balance*, vol. 7 No. 1 Juni, 2011.

Prakoso, Kesit Bambang. “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY”, *JAAI* vol 8, No. 2, Desember 2004.

Setiyawati, Hamzah, “Analisis PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Tehadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran: Pendekatan, Analisis Jalur”. *Jurnal Akutansi dan Keuangan Indonesia*, Vol.4, No. 2, Desember 2007.

Susana Hadi, “Peran Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Ekonomi di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah”. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 10, No.1, Juni 2009.

Ni Wayan Ratna Dewi, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. *Jurnal Akutansi Universitas Udayana*, Vol.2, No. 3, Maret 2017.

4. Undang-Undang:

UU No. 32-33 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

5. Internet:

Lampung” (On-line), tersedia di: [Http://id.m.wikipedia.org/wiki/Lampung](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Lampung) (11 Februari 2019).

Ricky Dwi Apriyono, “Peranan Negara Dalam Perekonomian persepektif islam” (On-line), tersedia di: <http://www.iaie-pusat.org/article/ekonomi-syariah/peranan-negara-dalam-perekonomian-persepektif-islam-part-1-1?language=en> ( 1Agustus 2019).

